



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RANHIR RENJA) TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

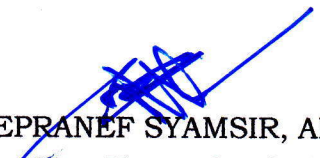
Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir RENJA) Tahun 2024 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2024. Penentuan target dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Periode 2021 – 2026. Penyusunan perubahan renja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna maka masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dumai, Juli 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan
Perindustriaian Kota Dumai,



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 19740925 199502 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
 BAB I PENDAHULUAN.....	 3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Pelaporan	8
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU.....	 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 36
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran renja perangkat daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
 BAB IV PENUTUP	 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya Penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam renja SKPD tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib sedangkan Perindustrian merupakan urusan Pilihan pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengembangkan potensi sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan perindustrian agar berkualitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renja tahun 2024 telah dilakukan analisa dan evaluasi capaian pada tahun 2022 serta perkiraan capaian pada tahun 2023 dan telah melalui proses perencanaan berjalan dengan memperhatikan isu strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM serta penjangkaran aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Koperasi dan UMKM dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja di bidang Koperasi ,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2021 – 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan , pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Koperasi dan UMKM dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah kota Dumai

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usah Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagi dasar yaitu :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian khususnya di Kota Dumai

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

Bentuk Penyajian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Dumai Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimalnya memenuhi perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. Penutup

Berdasarkan hal sebagai berikut tersebut diatas Renja Tahun 2024 di susun secara sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1.1.Latar belakang

1.2.Landasan Hukum.

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan
Capaian Renstra OPD

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 . Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
TAHUN LALU TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun anggaran 2022 dilaksanakan dalam 3 (Tiga) program meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2.17.01.2.01.02)
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD (2.17.01.2.01.03)
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2.17.01.2.01.04)
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (2.17.01.2.01.05)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi kinerja SKPD (2.17.01.2.01.06)

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.17.01.2.02.01)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2.17.01.2.02.05)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (2.17.01.2.02.07)

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2.17.01.2.03.06)

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.17.01.2.06.01)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.17.01.2.06.02)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.17.01.2.06.04)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.17.01.2.06.05)
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2.17.01.2.06.06)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.17.01.2.06.09)

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.17.01.2.08.01)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.17.01.2.08.02)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.17.01.2.08.04)

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.17.01.2.09.01)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.17.01.2.09.02)
- Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya (2.17.01.2.09.06)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.17.01.2.09.09)

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

2.1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (2.17.03.2.01.01)

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan terdiri dari :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (2.17.07.2.01.01)
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (2.17.07.2.01.05)

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Tabel T-C.29. Sedangkan realisasi hasil pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022 dapat diuraikan berdasarkan hasil / keluaran beserta targetnya dalam table T-C.29 dengan rincian laporan kinerja Perangkat daerah dengan pokok-pokok materi antara lain :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Indikator Jumlah Pertumbuhan Usaha Baru yang berskala Mikro dengan target 2520 UMKM telah dilaksanakan dengan realisasi 2264 UMKM capaian realisasi (89,84%), untuk kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha 2520 UMKM : Pelaku usaha merubah usaha yang dilakukannya, Misalnya tahun sebelumnya jualan barang harian pada saat didata namun tahun ini mereka jualan usaha lainnya, Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapat Bantuan Modal Usaha dengan target 1.400 UMKM telah dilaksanakan dengan realisasi 1334 UMKM capaian realisasi (95,29%) ada pelaku usaha yang sudah pindah tempat tinggal, bekerja di daerah lain, dan ada yang sudah meninggal.

2. program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah dilaksanakan dengan realisasi capaian target 100% sesuai dengan rencana yaitu :

a. Program :

No	Program	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100%

b. Kegiatan :

No	Kegiatan	Capaian
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Ralisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
2 17 01 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%		
2 17 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2 17 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2 17 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2 17 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2 17 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen		
		persentase administrasi keuangan perangkat daerah			100%	100%	100%	100%		
2 17 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan		
2 17 01 2 02 05	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan		
2 17 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%		
2 17 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%		
2 17 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		
2 17 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Ralisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 17 01 2 06 03	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket		
2 17 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		
2 17 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		
2 17 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Dokumen		
2 17 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan		
		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah			100%	100%	100%	100%		
2 17 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan		
2 17 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan		
2 17 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan		
		persentase pemeliharaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%		
2 17 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Unit		
2 17 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
2 17 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
2 17 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Unit		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			90%	90%	100%	35,50%		
2 17 03 2 01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			10 koperasi	10 koperasi	100%	100 Unit Usaha		

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Kerja Perangkat Daerah ;

Memperlihatkan pencapaian target Program yang sebagian besar telah terpenuhi, maka diharapkan pengambilan kebijakan dan penyediaan anggaran dapat mendorong pelaksanaan kegiatan dengan melakukan berbagai inovasi, sehingga kedepannya perkembangan ekonomi serta kegiatan perkoperasian, usaha kecil menengah dan perindustrian menjadi lebih baik serta mampu tampil dan bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi nasional bahkan internasional.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dari hasil perencanaan dan penganggaran yang perlu dilaksanakan adalah mempunyai suatu perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang untuk menjawab kegiatan yang berkembang dalam era digitalisasi saat ini.

- Untuk faktor penyebab tidak tercapainya realisasi 100% Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Indikator Jumlah Pertumbuhan Usaha Baru yang berskala Mikro dengan target 2520 UMKM telah dilaksanakan dengan realisasi 2264 UMKM capaian realisasi (89,84%) yaitu dengan melakukan pendataan ulang/survey pelaku usaha baru dengan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi OSS. Serta menerima data dari PPL UMKM.
- Untuk faktor penyebab tidak tercapainya realisasi 100% penerima Bantuan Produktif Usaha yaitu dengan tindakan perencanaan dan kebijakan mengevaluasi dan mengganti susunan penerima yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisa kinerja Pelayanan Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam evaluasi norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Pengolahan data dalam jumlah banyak, serta adanya perubahan yang bersifat rutin dan berulang-ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam penyediaan informasi.

Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”, oleh karenanya koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tertuang di BAB V Kemudahan, Perlindungan, dan Ppemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 86 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tahun 2022 sesuai rincian dari masing-masing unit kerja sebagai berikut :

II. 2.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi, banyaknya koperasi yang ada di Kota Dumai tentunya diperlukan suatu data yang akurat dan bisa rujukan bagi pengambilan kebijakan. Pendataan koperasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan jumlah koperasi yang ada di Kota Dumai, jumlah Koperasi di Kota Dumai Tahun 2022 dimana tercatat terdapat 288 Koperasi terlihat dalam tabel II. 2.1 dan Grafik II.2.1

Tabel. II.2.1

**Persentase Koperasi aktif tahun 2017-2022
Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Koperasi Aktif	199	177	184	163	163	180
2.	Jumlah Koperasi	161	213	219	245	271	288
3.	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	80,9%	83 %	84%	66,53%	60,15%	62,50

Dari seluruh Koperasi tersebut ada koperasi aktif sebanyak 180 Koperasi dan banyak pula koperasi yang tidak aktif yakni 108 Koperasi. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Koperasi juga terbagi ke dalam beberapa jenis, dimana jenis koperasi tersebut dibedakan berdasarkan beberapa faktor. Diantaranya faktor jenis usaha, tingkatan, status anggota dan fungsinya.

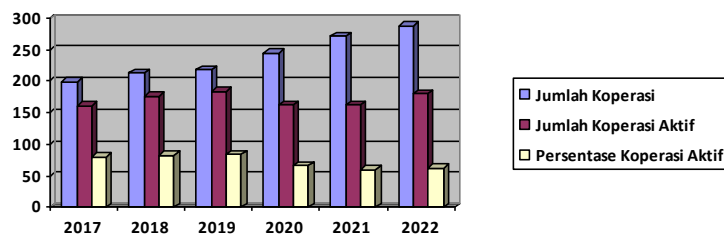
Persebaran jenis koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Banyaknya persebaran koperasi di Kota Dumai membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu simpan pinjam maupun usaha lainnya terutama koperasi yang mempunyai usaha toko. Dari koperasi yang ada terdapat usaha yang diharapkan meningkat dari segi aset maupun volume usahanya, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan baik koperasi pada umumnya dan anggota pada khususnya. Hasil perkembangan untuk data RAT (Rapat Akhir Tahun) koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai untuk koperasi yang melaksanakan RAT, terdapat beberapa koperasi yang tidak melaksanakan RAT karena kurangnya pemahaman ketua dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Maka akan dilakukan pengawasan secara berkala dan diikuti dalam pendidikan dan pelatihan agar para pengurus koperasi lebih berkompeten dan profesional dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus / pengawas. Kehadiran dari koperasi ini berupaya untuk bisa menjaga sikap kekeluargaan yang ada melalui asas kekeluargaan yang dimiliki oleh koperasi. Tentunya keberadaan koperasi akan bersaing dengan usaha-usaha lainnya yang saat ini semakin terlihat jelas kemajuannya. Sehingga koperasi pun menjadi penting untuk selalu diperhatikan di dalam pengelolaannya agar tetap bisa bergerak maju dan menjadi sarana pendidikan untuk masyarakat. Di

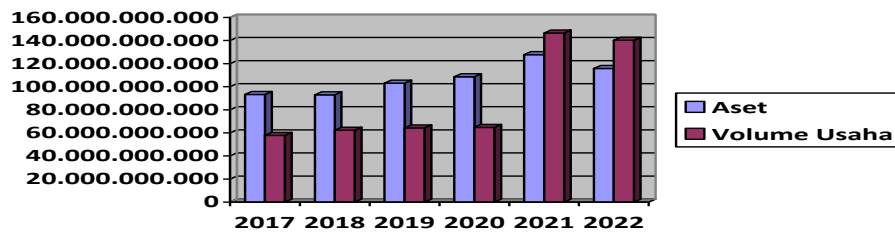
mana diketahui melalui sejarah perkembangan koperasi di Indonesia yang sangat panjang, tentu tidak mudah bagi koperasi untuk tenggelam begitu saja di tengah kemajuan zaman. Perkembangan koperasi di Kota Dumai meningkat dengan banyaknya anggota, di bawah di gambarkan perkembangan koperasi 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Grafik. II.2.1

**Grafik Perkembangan Koperasi Kota Dumai
Tahun 2017 sampai dengan 2022**



Dalam usahanya koperasi tidak terlepas dari jasa maupun keuntungan baik koperasi itu sendiri maupun sebagai timbal balik peran aktif dari anggota terhadap perkembangan usaha koperasinya, dibawah perkembangan aset dan volume usaha.

Grafik. II.2.1**Grafik Perkembangan Aset dan Volume Usaha Koperasi****II. 2.2 BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO**

Saat ini Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro dengan jumlah 8.799 UMKM, Intervensi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro adalah pendampingan dan pelatihan manajemen usaha. adalah salah satu pasar utama dalam menerapkan ekonomi kerakyatan, karena sebagian besar usaha ekonomi kerakyatan bergerak disektor usaha mikro kecil menengah. terlihat dalam tabel II. 2.2 dan Grafik II.2.2

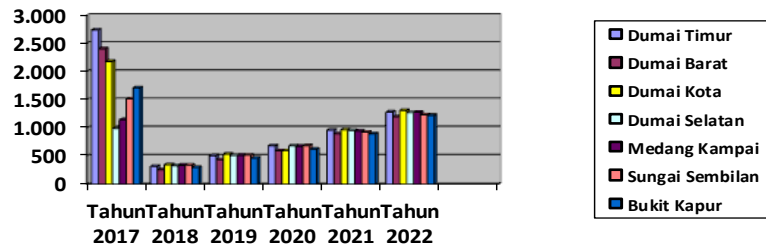
Tabel II.2.2
Data Perkembangan DATA UMKM Kota Dumai Per Kecamatan
Tahun (2017-2022)

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Dumai Timur	2.738	313	505	679	957	1.279
2.	Dumai Barat	2.402	255	430	591	891	1.196
3.	Dumai Kota	2.178	343	532	690	962	1.308
4.	Dumai Selatan	946	328	510	680	953	1.269
5.	Medang Kampai	1.143	333	511	671	938	1.277
6.	Sungai Sembilan	1.514	336	515	682	922	1.230
7.	Bukit Kapur	1.708	294	459	620	892	1.220
Jumlah		12.672	2.202	3.462	4.613	6.515	8.799

Note : Sumber Data 2018 s/d 2022 adalah data SIKP (Sytem Informasi kredit Program)

Grafik II.2.2

**Grafik Perkembangan UMKM Kota Dumai Per Kecamatan
Tahun 2017 sampai dengan 2022**



Note : Sumber Data 2018 s/d 2022 adalah data SIKP (Sytem Informasi kredit Program)

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro telah membina sebanyak 2.264 Pelaku Usaha Mikro jika dikelompokkan sesuai sektor usaha sebagai berikut :

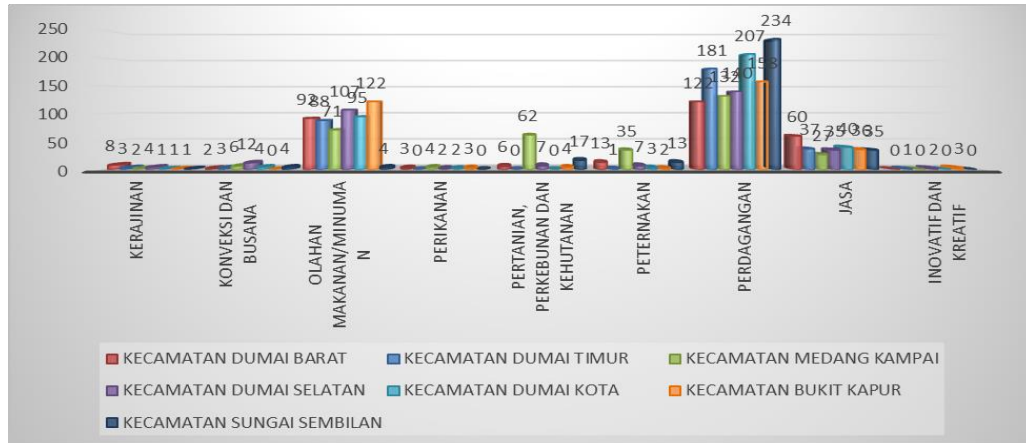
1. Sektor Kerajinan sebanyak 20 pelaku usaha mikro
2. Sektor Konveksi Busana sebanyak 31 pelaku usaha mikro
3. Sektor Olahan makanan/minuman sebanyak 579 pelaku usaha mikro
4. Sektor Perikanan sebanyak 14 pelaku usaha mikro
5. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 96 pelaku usaha mikro
6. Sektor Peternakan sebanyak 74 pelaku usaha mikro
7. Sektor Perdagangan sebanyak 1.174 pelaku usaha mikro
8. Sektor Jasa sebanyak 270 pelaku usaha mikro
9. Sektor Inovatif dan Kreatif sebanyak 6 pelaku usaha mikro

Dari data rekapitulasi kelompok sektor pelaku usaha tersebut diatas dapat dilihat pada tabel II.2.2 dan grafik II.2.2

TABEL II.2.2
REKAPITULASI DATA SEKTOR PELAKU UMKM PER KECAMATAN
SE KOTA DUMAI TAHUN 2022

NO	SEKTOR USAHA	KECAMATAN							TOTAL SEKTOR
		DUMAI BARAT	DUMAI TIMUR	MEDANG KAMPAI	DUMAI SELATAN	DUMAI KOTA	BUKIT KAPUR	SUNGAI SEMBILAN	
1	KERAJINAN	8	3	2	4	1	1	1	20
2	KONVEKSI DAN BUSANA	2	3	6	12	4	0	4	31
3	OLAHAN MAKANAN/ MINUMAN	92	88	71	107	95	122	4	579
4	PERIKANAN	3	0	4	2	2	3	0	14
5	PERTANIAN , PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	6	0	62	7	0	4	17	96
6	PETERNAKAN	13	1	35	7	3	2	13	74
7	PERDAGANGAN	122	181	132	140	207	158	234	1174
8	JASA	60	37	27	35	40	36	35	270
9	INOVATIF DAN KREATIF	0	1	0	2	0	3	0	6
JUMLAH		306	313	339	316	352	329	308	2264

GRAFIK II.2.2
GRAFIK DATA SEKTOR UMKM KOTA DUMAI
TAHUN 2022



Selain melakukan pembinaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian juga mempromosikan produk UMKM dengan meletakkan Lemari Display/ Outlet di beberapa Hotel seperti :

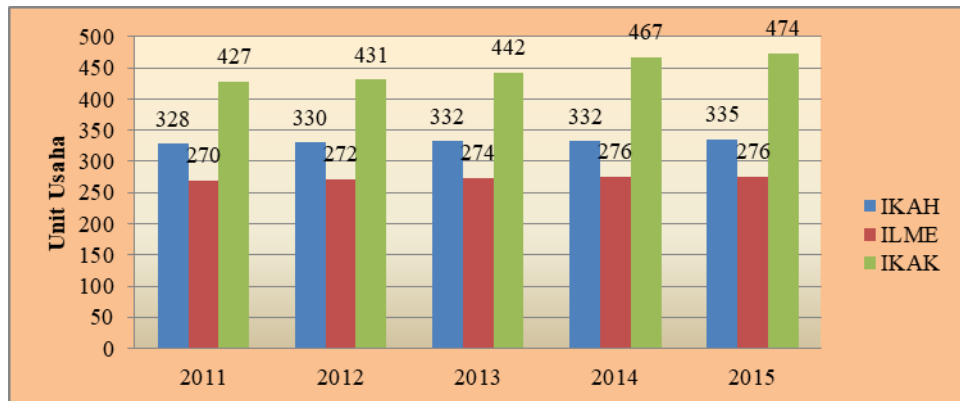
1. Hotel Comforta
2. Hetol Patra
3. Hotel Grand Zuri
4. Hotel The Zuri
5. Hotel Sonaview

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengadakan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) melalui sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan memberikan Bantuan Produktif Usaha Menengah (BPUM) dengan target 1.400 Pelaku usaha sebesar Rp. 1.000.000./Pelaku Usaha.

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengadakan Program Pengembangan UMKM melalui sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi mengadakan Launcing Aplikasi Digiloka dan Sistem pembayaran QRIS bagi pelaku usaha di Kampung Kuliner.

III. 2.3. Bidang Perindustrian

Pelayanan dibidang industri yang menjadi kewenangan OPD adalah pelayanan dibidang Non perizinan. Pelayanan dibidang industri dititik beratkan kepada Sub sektor Industri Kecil dan Menengah, karena memang IKM tersebut pada umumnya baik teknologi yang digunakan maupun pengelolaan usahanya masih bersifat sederhana dan cendrung tidak memiliki daya saing bila dibandingkan usaha besar, maka dalam pelayanan OPD untuk pengembangannya bentuk pembinaan teknis berupa pembinaan teknologi proses, perluasan dan pengembangan pasar, serta manajemen pengelolaan usaha. Kinerja pelayanan serta pembinaan terhadap industri selama 5 tahun terakhir telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan sektor Industri di Kota Dumai. Untuk mendapatkan gambaran dari pertumbuhan industri, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II.2.3**Perkembangan Unit Usaha Industri**

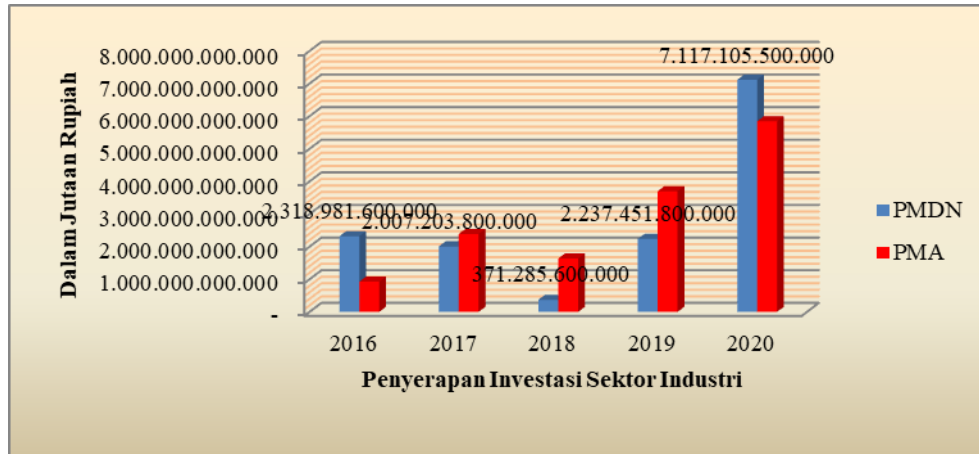
Dari grafik 1 diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan industri kimia agro dan hasil hutan di Kota Dumai selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, maka industri kimia agro dan hasil hutan mengalami pertumbuhan jumlah unit usaha 7 unit usaha (2,09%).

Meskipun penambahan unit usaha ini dibawah 5%, namun jika kita lihat maka Industri yang ada sudah mampu bertahan dalam menghadapi krisisi global dunia bahkan muncul unit usaha baru. Sedangkan Industri logam, mesin dan elektro juga mengalami kenaikan meskipun tidak significant yaitu 6 unit usaha (2,22%). Untuk Industri kecil dan aneka kerajinan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, industri ini berjumlah 427 unit usaha, jumlah unit usaha industri meningkat menjadi 474 unit usaha atau tumbuh sebanyak 47 unit usaha (11,01%). Capaian ini cukup bagus karena ditengah-tengah krisis global usaha indutri di Kota Dumai mampu bertahan sehingga tetap mampu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai

Grafik II.2.3.**Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri**

Tumbuhnya unit usaha sektor industri tentu akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri tersebut. Terkait dengan penyerapan tenaga kerja oleh unit-unit usaha di sektor industri, secara umum persen proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur terdapat kenaikan yang cukup significant. Pada tahun 2016 proporsi Tenaga Kerja pada sektor industri manufaktur menunjukkan sebesar 13,41 %, sedangkan pada tahun 2017 menunjukkan sebesar 14,51% mengalami kenaikan sebesar 1,1% bila dibandingkan tahun 2016 , pada tahun 2018 menunjukkan sebesar 14,68% mengalami kenaikan sekitar 0,71% bila dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2019 menunjukkan sebesar 14,91% mengalami kenaikan sekitar 0,23% bila dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2020 menunjukkan 13,61% mengalami penurunan sebesar 1,3% bila dibandingkan tahun 2019.

Grafik II.2.3
Penyerapan Investasi Sektor Industri
Kota Dumai



Jika dilihat pada grafik 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan yang sangat significant antara penanaman modal dalam negeri terkait penyerapan investasi. setiap tahunnya.

Selanjutnya bila dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Dumai terutama dalam pembentukan PDRB, maka sektor industri peranannya cukup besar. kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB atas harga berlaku sebesar 27,18 %. Demikian pula dengan sektor perdagangan. kontribusi perdagangan besar dan eceran termasuk reperasi mobil dan reperasi sepeda motor 27,29. Pertumbuhan ekonomi Daerah tidak dapat dipisahkan dengan peranan dunia usaha yang ada, baik dalam skala kecil maupun skala besar, maka untuk itu, dilihat dari prospek pengembangannya, kota Dumai memiliki sejumlah potensi sumber daya yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, namun kemampuan daerah secara totalitas masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama dalam permodalan, teknologi, dan keterampilan sumber daya manusianya. Untuk itu, pada masa mendatang pertumbuhan industri menjadi sangat strategis dan menjadi skala prioritas, terutama dalam penyediaan

lapangan kerja dan lapangan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat . Dengan berkembangnya industri Skala besar seperti Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi secara luas terutama dalam merangsang terbukannya kesempatan berusaha dengan tumbuhnya unit-unit usaha baru di Sub sektor industri kecil menengah lainnya sebagai industri pendukung.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan NSPK, SPM maupun IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tolak ukur dan indikator pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta sesuai dengan tugas fungsi, bersama ini disampaikan Capaian kinerja Pelayanan Perangkat daerah, dapat di lihat tabel (T.C.30)

Tabel 2.7 (T-C30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Dumai

NO	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM/Standar Nasional	IKK (Program/Kegiatan)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar												
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah												
2.17.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,99%	92,77%	100%	
2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	80,96%	84,25%	7 Dokumen	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93,06%	91,20%	1 Dokumen	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	99,37%	98,74%	2 Laporan	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	9 Orang	9 Orang	14 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	0%	0%	9 Orang	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	6 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	79,40%	95,63%	7 Paket	

NO	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM/Standar Nasional	IKK (Program/Kegiatan)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	3 Unit	3 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	99,58%	0%	23 Unit	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	96,04%	97%	3 Laporan	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	38 unit	38 unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	98,55%	99,93%	44 Unit	
2.17.03.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24,50%	30%	35,50%	40%	40%	40%	97,17%	96,29%	40%	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	85 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	97,17%	96,29%	90 Unit Usaha	
2.17.04.2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,53%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0%	0%	7,13%	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	14 unit usaha	14 unit usaha	42 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	0%	0%	25 unit usaha	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya

NO	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM/Standar Nasional	IKK (Program/Kegiatan)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17.05.2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17,55%	19,55%	21,55%	23,55%	23,55%	23,55%	0%	0%	23,55%	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0%	0%	60 Orang	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya
2.17.06.2	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Peresentase yangdiberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	24,50%	30%	35,50%	40%	40%	40%	0%	0%	40%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16 orang	18 orang	120 orang	122 orang	122 orang	122 orang	0%	0%	122 orang	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya
2.17.07.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	5%	10%	15%	20%	20%	20%	95,97%	50,44%	20%	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha mikro	2520 UMKM	5040 UMKM	7560 UMKM	1080 UMKM	1080 UMKM	1080 UMKM	95,97%	50,44%	1080 UMKM	

NO	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM/Standar Nasional	IKK (Program/Kegiatan)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(13)
2.17.08.2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase jumlah UMKM yang dibina	2%	3%	4%	5%	7%	10%	0%	0%	4%	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah UMKM yang dibina	70 UMKM	85 UMKM	100 UMKM	115 UMKM	115 UMKM	115 UMKM	0%	0%	115 UMKM	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3.31.02.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	40%	50%	75%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0%	0%	4 Dokumen	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya

NO	Indikator (Nama Program Kegiatan)	SPM/Standar Nasional	IKK (Program/Kegiatan)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
3.31.03.2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Jumlah Industri yang dipantau	5%	15%	15%	20%	25%	30%	0%	0%	20%	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	0%	2 Dokumen	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya
3.31.04.2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%	0%	0%	65%	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	1 Dokumen	Kegiatan ini ditahun 2021 dan 2022 tidak ada anggarannya

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian pada tahun dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

II. 3.2 Permasalahan dan Hambatan

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan Dinas serta tantangan eksternal baik dari lokal yang bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional. Isu strategis merupakan kondisi keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Adapun permasalahan dan hambatan yang dijumpai adalah :

- (1) Pelaku usaha masyarakat Kota Dumai sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang sulit berkembang karena skala usaha yang ekonomis dengan bentuk badan usaha perseorangan dan dikelola secara tertutup serta kelengkapan administrasi yang tidak memadai. Kondisi ini membuat kurang maksimalnya upaya pemberdayaan usaha UMKM karena jumlah dan jangkauan UMKM yang banyak dan luas.

b.

- (1) Masih rendahnya pemahaman tentang perkoperasian disebabkan masih rendahnya pemahaman perkoperasian dikalangan para pengelola, pengurus maupun anggota koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan dapat dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi juga dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh koperasi.
- (2) Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan koperasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perkoperasian. Semakin buruknya citra koperasi di tengah masyarakat karena banyaknya koperasi yang tidak aktif, terlilit persoalan hukum, bahkan alamat yang sulit diidentifikasi.
- (3) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mayoritas SDM yang dimiliki berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kewirausahaan dan manajemen seadanya.
- (4) Masih terbatasnya sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
- (5) Masih kurangnya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Pendamping Bidang Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan agak sulit dilakukan dan merupakan kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sebanding dengan cakupan jumlah koperasi, UMKM dan IKM.
- (6) Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.
- (7) Masih kurangnya pelatihan tentang motivasi kewirausahaan.
- (8) Belum efektifnya Pelaksanaan program kemitraan antar pelaku usaha IKM dan antara IKM dengan perusahaan besar.
- (9) Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
- (10) Masih lemahnya peranan industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian.

- (11) Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar.
- (12) Produk berbasis bahan baku lokal dan menggunakan teknologi sederhana.
- (13) Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dari produk-produk IKM sehingga pemasaran produk IKM masih bersifat lokal dan sulit berkembang.

II. 3.3 Dampak Visi dan Misi Kepala daerah Terhadap capaian Program

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai dengan Visi Kota Dumai ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu pada Budaya Melayu”*** dan Misi Kesatu **Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri** dan Misi Kedua **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu** dan Tema Arah Kebijakan Kota Dumai dalam RKPD 2024 yakni “Memperkuat Instrumen Pendukung yang Kondusif Bagi Untuk Memantapkan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

II. 3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian disebabkan faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal	Faktor Eksternal
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	PELUANG / OPPRTUNITIES (O)
1. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro 3. SOP disetiap kegiatan 4. Ketersediaan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro 5. Ketersediaan Dasar Hukum, Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro 6. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK) dan kewenangan 7. Keterbatasan personil dilapangan dan aparatur 8. Adanya dukungan APBD Kota Dumai dalam penyelenggaraan kegiatan	1. Pertumbuhan jumlah koperasi 2. Legalitas dan peluang usaha koperasi 3. Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha 4. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 5. Pertumbuhan pangsa pasar regional, nasional dan internasional 6. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro

Faktor Internal	Faktor Eksternal
KELEMAHAN / WEAKNESS (W)	ANCAMAN / THREATS (T)
1. Kualitas dan kuantitas SDM Pembina perkoperasian dan usaha mikro 2. Rendahnya mekanisme penegakan sanksi, terhadap Koperasi dan Usaha Mikro 3. Kurangnya sarana prasarana pendukung operasional 4. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi dan usaha mikro 5. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai) dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis 6. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	1. Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif 2. Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan usaha mikro 3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 4. Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil 5. Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta kepatuhan terhadap peraturan

Dari berbagai permasalahan baik faktor penghambat maupun pendorong, dan dari hasil identifikasi pada Rencana Strategis Dinas, maka ditetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut :

- Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder
- Peningkatan Produktivitas Masyarakat
- Peningkatan Daya saing daerah dalam iklim

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2024/2024 telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah dilakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

Pada rancangan awal RKPD ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi lokasi kegiatan maupun anggaran, sebagai contoh perubahan lokasi kegiatan yang berubah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, hal ini juga telah melalui proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anggaran sehingga apa yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana pada tabel 2.4 (terlampir)

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Lama	Indikator Kinerja Sesuai Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja lama	Indikator Kinerja Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.144.021.671	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.144.021.671	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	84.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	84.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPD dan LKJIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	24.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPD dan LKJIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	24.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.274.813.671	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.274.813.671	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.191.813.671	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dumai	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.191.813.671	
	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.000.000	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	1 Laporan	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	1 Laporan	65.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Lama	Indikator Kinerja Sesuai Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja lama	Indikator Kinerja Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dumai	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	100%	60.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dumai	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	100%	60.000.000	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	55.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	55.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14 Orang	95.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14 Orang	95.000.000	
	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	25.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	25.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	10 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	10 Orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	855.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	855.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah penyediaan kebutuhan Komponen Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah penyediaan kebutuhan Komponen Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan peralatan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	150.000.000	
	penyediaan peralatan rumah tangga	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	55.000.000	penyediaan peralatan rumah tangga	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	55.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah penyediaan Kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah penyediaan Kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	500.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	1.125.208.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	1.125.208.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	125.208.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	125.208.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Lama	Indikator Kinerja Sesuai Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja lama	Indikator Kinerja Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	350.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		350.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		350.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		300.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		300.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dumai	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.025.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dumai	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.025.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	220.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa supir kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	800.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa supir kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	800.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	625.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	625.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan perlengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan perlengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan perlengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan perlengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	175.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Lama	Indikator Kinerja Sesuai Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja lama	Indikator Kinerja Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dumai	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,5%	120.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dumai	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,5%	120.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	100 koperasi	120.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	100 koperasi	120.000.000	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	120.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	120.000.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dumai	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,13%	200.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dumai	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,13%	200.000.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	21 koperasi	200.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	21 koperasi	200.000.000	
	Penghargaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Terlaksananya kegiatan penghargaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	21 Unit usaha	200.000.000	Penghargaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Terlaksananya kegiatan penghargaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	21 Unit usaha	200.000.000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dumai	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21,55%	265.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dumai	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21,55%	265.000.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	50 orang	265.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	50 orang	265.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dumai	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	265.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dumai	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	265.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Konerja Lama	Indikator Konerja Sesuai Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Konerja lama	Indikator Konerja Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dumai	Peresentase yangdiberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peresentase yangdiberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,50%	100.000.000	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dumai	Peresentase yangdiberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peresentase yangdiberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,50%	100.000.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20 Orang	100.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20 Orang	100.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	100.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	100.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dumai	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	15%	1.600.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dumai	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	15%	2.400.000.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dumai	Jumlah usaha mikro	Jumlah usaha mikro	7560 UMKM	1.600.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dumai	Jumlah usaha mikro	Jumlah usaha mikro	7560 UMKM	2.400.000.000	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah pertumbuhan usaha baru yang berskala mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3780 Unit Usaha	300.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah pertumbuhan usaha baru yang berskala mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3780 Unit Usaha	300.000.000	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang bermitra	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	50.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang bermitra	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	50.000.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	50.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	850.000.000	1. Melalui kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Pelaku UMKM, menambah wawasan dan pengetahuan pelaku UMKM tentang arti wirausaha, cara pemasaran produk melalui media online dan membuat kemasan yang baik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi dan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produktivitas dan produk pelaku usaha. 2. Melalui kegiatan ini dilaksanakan Pemberian Sertifikat Halal kepada pelaku umkm yang reguler yang mengandung bahan baku daging karena halal tersebut tidak termasuk program halal gratis. Tujuan pemberian halal (Sistem Jaminan Halal) adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh Pelaku UMKM. Adanya sertifikat halal juga memudahkan Pelaku UMKM dalam memasarkan produknya di dalam maupun di luar daerah Kota Dumai. 3. Melalui kegiatan ini akan diadakan akomodasi bazar untuk mengadakan promosi produk-produk unggulan Pelaku UMKM Kota Dumai Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan serta menambah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Lama	Indikator Kinerja Sesuai Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja lama	Indikator Kinerja Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang diberikan bantuan , jmlah UMKM yang diberikan pelatihan untuk pengembangan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	210 Orang	1.000.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang diberikan bantuan , jmlah UMKM yang diberikan pelatihan untuk pengembangan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	210 Orang	1.000.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang diberikan fasilitasi pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	210 orang	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah UMKM yang diberikan fasilitasi pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	210 orang	200.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dumai	Persentase jumlah UMKM yang dibina	Persentase jumlah UMKM yang dibina	4%	250.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dumai	Persentase jumlah UMKM yang dibina	Persentase jumlah UMKM yang dibina	4%	250.000.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dumai	Jumlah UMKM yang dibina	Jumlah UMKM yang dibina	100 Unit Usaha	250.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dumai	Jumlah UMKM yang dibina	Jumlah UMKM yang dibina	100 Unit Usaha	250.000.000	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dumai	Jumlah UMKM yang dibina	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	250.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dumai	Jumlah UMKM yang dibina	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	250.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dumai	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	75%	335.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dumai	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	75%	335.000.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	4 Dokumen	335.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	4 Dokumen	335.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dumai	Jumlah kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai, jumlah IKM Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	335.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dumai	Jumlah kesepakatan swasta dan IKM Kota Dumai, jumlah IKM Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	335.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dumai	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	15%	75.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dumai	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	15%	75.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Industri yang diberikan fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Industri yang diberikan fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sintem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dumai	Jumlah Industri yang diberikan fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sintem Informasi Industri Nasional	Dumai	Jumlah Industri yang diberikan fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Lama	Indikator Kinerja Sesuai Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja lama	Indikator Kinerja Kepmen 050	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dumai	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	60%	125.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dumai	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	60%	125.000.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	1 Dokumen	125.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	1 Dokumen	125.000.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 Dokumen	125.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 Dokumen	125.000.000	
Total						12.214.021.671	Total						13.014.021.671

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami review usulan program dan kegiatan masyarakat pada RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana pada tabel 2.5

Tabel 2.5 (T-C32)**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan****Tahun 2024****Kota Dumai**

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volum	Catatan
1.	Tambahan Modal Untuk Pelaku UMKM	Gg.Pala		10 KK	Kecamatan Dumai Kot
2.	Pengadaan Alat-alat usaha (mixer, tungku, alat memasak dll)	Gg.Pala		10 KK	Kecamatan Dumai Kot

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan Pembangunan Provinsi Riau dan RPJMD Kota Dumai. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah .

Tabel 3.1

No	Prioritas Nasional	Proritas Pembangunan Daerah	Bidang Pada Dinas
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industry dan kepelabuhanan	Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian

2.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu	Bidang Usaha Kecil dan Menengah
----	---	---	---------------------------------

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menunjukkan adanya hubungan untuk koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga kedepan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota dumai berupaya untuk lebih meningkatkan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB (kategori industry pengolahan).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indicator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Berdasarkan analisa permasalahan dan isu strategis serta Hasil Pembahasan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program serta Renstra Tahun 2021-2026, telah dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yaitu :

- Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM dengan indikator kinerja :
 - ❖ Persentase Koperasi Aktif
 - ❖ Persentase Usaha Mikro dan Kecil
- Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai dengan indikator kinerja :
 - ❖ Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
 - ❖ Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Sedangkan untuk Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM;
- Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.a Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai program dan kegiatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai juga melihat faktor pertimbangan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dimana dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kota yang dijabarkan dalam sasaran PD adalah kesinambungan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2024 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024.
- Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024.
- Prioritas pengembangan sistem Perkoperasian dan Usaha Mikro dan Perindustrian yang diwujudkan dalam kegiatan.

Selain hal tersebut diatas yang menjadi rumusan program kegiatan juga meliputi :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- Pengembangan daerah terisolir,

3.3.b Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Pada Tahun 2024 direncanakan ada 10 (Sepuluh) program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 dibawah :

Tabel T-C.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 17 01 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM	Dumai	100%	9.144.021.671	APBD Dumai		100%	10.058.423.838		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	9 Dokumen	84.000.000	APBD Dumai		9 Dokumen	92.400.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	5.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	5.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	5.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	5.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	5.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	5.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	5.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	5.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	3 Dokumen	24.000.000	APBD Dumai		3 Dokumen	26.400.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	2 Dokumen	25.000.000	APBD Dumai		2 Dokumen	27.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	2 Laporan	15.000.000	APBD Dumai		2 Laporan	16.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 17 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	1 Dokumen	5.274.813.671	APBD Dumai		1 Dokumen	5.802.295.038		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	31 Orang	5.191.813.671	APBD Dumai		31 Orang	5.710.995.038		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 02 05	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	1 Laporan	18.000.000	APBD Dumai		1 Laporan	19.800.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dumai	1 Laporan	65.000.000	APBD Dumai		1 Laporan	71.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Dumai	2 Laporan	60.000.000	APBD Dumai		2 Laporan	66.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 03 01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	1 Laporan	55.000.000	APBD Dumai		1 Laporan	60.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dumai	14 Orang	95.000.000	APBD Dumai		7 Orang	104.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 05 09	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	2 Orang	20.000.000	APBD Dumai		2 Orang	22.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	2 Orang	25.000.000	APBD Dumai		2 Orang	27.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	Dumai	10 Orang	50.000.000	APBD Dumai		10 Orang	55.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 17 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	7 Paket	855.000.000	APBD Dumai		100%	940.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dumai	1 paket	50.000.000	APBD Dumai		1 paket	55.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dumai	1 paket	150.000.000	APBD Dumai		1 paket	165.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 03	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dumai	1 paket	55.000.000	APBD Dumai		1 paket	60.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dumai	1 paket	25.000.000	APBD Dumai		1 paket	27.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dumai	1 paket	50.000.000	APBD Dumai		1 paket	55.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dumai	1 Dokumen	15.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	16.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dumai	1 Dokumen	10.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	11.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	1 laporan	500.000.000	APBD Dumai		1 laporan	550.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Dumai	23 Unit	1.125.208.000	APBD Dumai		23 Unit	1.237.728.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dumai	1 Unit	125.208.000	APBD Dumai		1 Unit	137.728.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dumai	2 Unit	350.000.000	APBD Dumai		2 Unit	385.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dumai	10 Unit	350.000.000	APBD Dumai			385.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dumai	10 Unit	300.000.000	APBD Dumai			330.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 17 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	3 Laporan	1.025.000.000	APBD Dumai		3 Laporan	1.127.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	1 laporan	5.000.000	APBD Dumai		1 laporan	5.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dumai	1 laporan	220.000.000	APBD Dumai		1 laporan	242.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dumai	1 laporan	800.000.000	APBD Dumai		1 laporan	880.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Dumai	44 unit	625.000.000	APBD Dumai		66 Unit	687.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dumai	1 Unit	50.000.000	APBD Dumai		1 Unit	55.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dumai	14 Unit	175.000.000	APBD Dumai		14 Unit	192.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dumai	28 Unit	100.000.000	APBD Dumai		Unit	110.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dumai	1 Unit	300.000.000	APBD Dumai		Unit	330.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 17 03 2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	35,5%	120.000.000	APBD Dumai		35,5%	132.000.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 03 2 01	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Dumai	100 koperasi	120.000.000	APBD Dumai		90 koperasi	132.000.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 03 2 01 03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola KelembagaanKoperasi	Dumai	40 Unit Usaha	50.000.000	APBD Dumai		90 Unit Usaha	55.000.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 03 2 01 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Dumai	60 Unit Usaha	70.000.000	APBD Dumai		90 Unit Usaha	77.000.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang

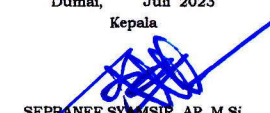
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 17 04 2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	7,13%	200.000.000	APBD Dumai		7,13%	220.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah
2 17 04 2 01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Dumai	42 koperasi	200.000.000	APBD Dumai		42 koperasi	220.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah
2 17 04 2 01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dumai	21 Unit usaha	100.000.000	APBD Dumai		21 Unit usaha	110.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah
2 17 04 2 01 03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Dumai	21 Unit usaha	100.000.000	APBD Dumai		21 Unit usaha	110.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah
2 17 05 2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	21,55%	265.000.000	APBD Dumai		21,55%	291.500.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 05 2 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	60 orang	265.000.000	APBD Dumai		50 orang	291.500.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 05 2 01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Dumai	60 orang	265.000.000	APBD Dumai		50 orang	291.500.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 06 2	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peresentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	35,50%	100.000.000	APBD Dumai		35,50%	110.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 06 2 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	20 Orang	100.000.000	APBD Dumai		20 Orang	110.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 06 2 01 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai	100 keluarga	100.000.000	APBD Dumai		100 keluarga	110.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 17 07 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Dumai	15%	2.400.000.000	APBD Dumai		15%	2.640.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 07 2 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro	Dumai	7560 UMKM	2.400.000.000	APBD Dumai		7560 UMKM	2.640.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 07 2 01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Dumai	60 Unit Usaha	50.000.000	APBD Dumai		3780 Unit Usaha	55.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 07 2 01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Dumai	210 Orang	1.000.000.000	APBD Dumai		210 Orang	1.100.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 07 2 01 011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dumai	30 Unit Usaha	400.000.000	APBD Dumai		75 Unit Usaha	440.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 07 2 01 013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dumai	20 Unit Usaha	300.000.000	APBD Dumai		210 Orang	330.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 07 2 01 014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Dumai	840 Unit Usaha	300.000.000	APBD Dumai		210 orang	330.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 07 2 01 015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dumai	50 Orang	350.000.000	APBD Dumai		50 Orang	385.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
2 17 08 2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah UMKM yang dibina	Dumai	4%	250.000.000	APBD Dumai		4%	275.000.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 08 2 01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina	Dumai	200 Unit Usaha	250.000.000	APBD Dumai		100 Unit Usaha	275.000.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
2 17 08 2 01 06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi	Dumai	200 Unit Usaha	250.000.000	APBD Dumai		100 Unit Usaha	275.000.000		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Dumai			APBD Dumai							
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		Dumai			APBD Dumai							
3 31 02 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaiannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	Dumai	75%	335.000.000	APBD Dumai		75%	368.500.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
3 31 02 2 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	Dumai	4 Dokumen	335.000.000	APBD Dumai		4 Dokumen	368.500.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
3 31 02 2 01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dumai	1 Dokumen	110.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	121.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
3 31 02 2 01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dumai	1 Dokumen	225.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	247.500.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
3 31 03 2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	Dumai	15%	75.000.000	APBD Dumai		15%	82.500.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
3 31 03 2 01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	2 Dokumen	75.000.000	APBD Dumai		2 Dokumen	82.500.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan
3 31 03 2 01 01	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sintem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dumai	1 Dokumen	75.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	82.500.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan	Prioritas		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Nasional	Provinsi	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
3 31 04 2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	Dumai	60%	125.000.000	APBD Dumai		60%	82.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3 31 04 2 01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINas	Dumai	2 Dokumen	125.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	82.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3 31 04 2 01 01	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dumai	1 Dokumen	50.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	55.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3 31 04 2 01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dumai	1 Dokumen	75.000.000	APBD Dumai		1 Dokumen	82.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Total					13.014.021.671				14.260.423.838				

Dumai, Juli 2023
Kepala


SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						13.014.021.671,00							14.447.423.038,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.479.021.671,00							13.858.923.038,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						12.479.021.671,00							13.858.923.038,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA BIDANG PERINDUSTRIAN	-			100 %	9.144.021.671,00						-	10.184.923.038,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	-	-	-	92.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	24.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.274.813.671,00			-	-	-	-	5.818.795.038,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	5.191.813.671,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.710.995.038,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	18.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	95.000.000,00			-	-	-	-	104.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	20.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	855.000.000,00			-	-	-	-	940.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	150.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	55.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	25.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.125.208.000,00			-	-	-	-	1.347.728.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.208.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		137.728.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	350.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.025.000.000,00			-	-	-	-	1.127.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	220.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		242.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	800.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		880.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	625.000.000,00			-	-	-	-	687.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	175.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		192.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			40 %	120.000.000,00						-	137.500.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	-			110 Koperasi	120.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	-	-	137.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				40 Unit Usaha	50.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	-		60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	70.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		77.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			7,13 %	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	-			25 Koperasi	200.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	100.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			23,55 %	265.000.000,00						-	291.500.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	-			60 Orang	265.000.000,00			-	-	-	-	291.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	265.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		291.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			40 %	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			22 Koperasi	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	-			20 %	2.400.000.000,00						-	2.640.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro	-			10080 UMKM	2.400.000.000,00			-	-	-	-	2.640.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				210 Unit Usaha	1.000.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	400.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		440.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				840 Unit Usaha	300.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				50 Orang	350.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	-		385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang dibina	-			5 %	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina	-			115 UMKM	250.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				200 Unit Usaha	250.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						535.000.000,00							588.500.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						535.000.000,00							588.500.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	-			100 %	335.000.000,00						-	368.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	-			1 Dokumen	335.000.000,00			-	Peningkata n Perekono mian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	-	-	368.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	110.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Perekono mian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	-		121.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	225.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		247.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	-			25 %	75.000.000,00						-	82.500.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis yang di terbitkan	-			9 Surat	75.000.000,00			-	-	-	-	82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan	-			65 %	125.000.000,00						-	137.500.000,00		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkanya menjadi Perda	-			1 Dokumen	125.000.000,00			-	-	-	-	137.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				5 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				5 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	JUMLAH							13.014.021.671,00							14.447.423.038,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan usulan awal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tahun 2024 membutuhkan dana sejumlah Rp.13.014.021.671 (*Tiga Belas Milyar Empat Belas Juta Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kota Dumai. Apabila rumusan dengan 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan, yang berlokasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, maupun pagu tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, maka akan disinkronkan dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang melekat di kementerian maupun propinsi dan untuk selanjutnya akan diserahkan kembali melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai (TAPD) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Terlampir.

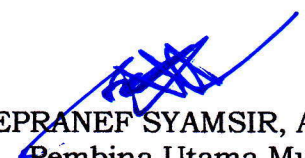
BAB V
PENUTUP

Dalam RPJM Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan kebijakan Nasional disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur menekankan asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Selaras dengan itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berupaya untuk melakukan bimbingan, pelatihan, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan untuk meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional dengan terserapnya tenaga kerja disektor industri, meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas dan tumbuh pertahun, serta meningkatkan jumlah produk UMKM yang berkualitas dan menjadi andalan perekonomian masyarakat serta menekan angka pengangguran untuk pengentasan kemiskinan.

Dumai, Juli 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kota
Dumai,



SEPRANEF SYAMSIR, AP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001